



Buletin Parlementaria

Hilirisasi Produk Food Estate Harus Dioptimalkan Demi Kesejahteraan Petani



Nomor 1262/1/IX/2023 • September 2023



9 772614 339005



**3 KTT ASEAN
Perlu Tekankan
Pentingnya
Koordinasi
Parlemen dengan
Pemerintah**



**21 Bahas
Penanganan
Polusi Udara,
Charles Honoris
Usul Bentuk
Pansus**



Hilirisasi Produk *Food Estate* Harus Dioptimalkan Demi Kesejahteraan Petani

Hilirisasi hasil panen program *food estate* perlu menjadi perhatian bagi pemerintah.

Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Komisi IV DPR RI adalah dengan mengemas gabah hasil panen menjadi beras premium agar nilai jual produk menjadi lebih tinggi. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi IV ke Pulang Pisau, Djarot Saiful Hidayat.

"Dari hasil evaluasinya progresnya cukup baik dan program ini membawa banyak manfaat. Meskipun ada beberapa yang perlu segera ditindaklanjuti. Satu adalah hilirisasi, supaya hasil panen di sini langsung bisa diolah disini, dari gabah menjadi padi yang premium, yang bagus. Tinggal beras premium kita kemas yang bagus sehingga harganya bisa semakin meningkat. Nah ini dulu hilirisasinya ya," ujar Djarot usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Jumat (1/9).

Menilik tren hasil produksi yang terus meningkat, Djarot mengingatkan pemerintah untuk betul-betul mengoptimalkan hilirisasi penting, agar kesejahteraan petani pengelola lahan *food estate* ini bisa terjamin. Djarot juga meminta agar pemerintah tidak hanya fokus kepada peningkatan produksi saja, tetapi juga peningkatan nilai jual produknya.

"Produksinya naik ya, dari 2 ton sekarang sudah menjadi 3,5 jadi 4,5 ton. Bertahap, karena ini lahan asam pasang surut, gambutnya tipis. Sehingga kedepan semakin tahun



Tim Kunspek Komisi IV DPR RI Djarot Saiful Hidayat saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Jumat, (1/9/2023).

akan produksinya akan semakin meningkat. Artinya apa? produksi meningkat, kesejahteraan petani akan meningkat," terang Djarot.

Legislator Fraksi PDI- Perjuangan itu juga menilai bahwa proses hilirisasi produk pangan itu harus bisa segera dicapai, mengingat secara distribusi sudah tidak ditemui hambatan lagi. Selaras dengan yang disampaikan Djarot Saiful, Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonidipuro juga mengapresiasi program *food estate* di Pulang Pisau ini dan meminta pemerintah agar bisa melanjutkan program tersebut dengan berbagai perbaikan.

"Nah sekarang ternyata kita lihat produknya walaupun belum maksimal baru 3 ton tapi sudah tampak dan dari para petani minta agar ini dilanjutkan dan kita paham

maka kepada pemerintah kami mendorong agar semua yang dibutuhkan terutama air. Mudah-mudahan (Kementerian) PUPR paham untuk melanjutkan proyek-proyek ataupun irigasi yang ada untuk pengairan pertanian ini," ujar Darori.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, juga menambahkan bahwa pemerintah daerah, baik provinsi maupun Kabupaten Pulang Pisau akan terus melakukan pemberdayaan dan perbaikan demi hasil *food estate* yang lebih maksimal. "Kita kan melakukan pembinaan ya secara terus-menerus ya tahun ini juga kita juga membantu dengan pengadaan bibit IR 42, PB 42. Di samping juga kami juga membantu tahun ini dan tahun 2024 itu membangun untuk hilirisasinya," pungkas Edy. **syn/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya





KTT ASEAN Perlu Tekankan Pentingnya Koordinasi Parlemen dengan Pemerintah



Ketua DPR RI Puan Maharani saat menghadiri pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta. Puan pun menekankan pentingnya koordinasi antara Parlemen dan Pemerintah dalam menghadapi situasi global yang berubah-ubah. Mengingat saat ini dunia menghadapi situasi global yang sangat dinamis.



PARLEMEN DAN PEMERINTAH HARUS BERSINERGI UNTUK MENCAPAI TUJUAN BERSAMA.

"Perubahan dalam tatanan geopolitik dan ekonomi dunia menuntut kita untuk bersatu dalam upaya mengatasi berbagai tantangan. Parlemen dan Pemerintah harus bersinergi untuk mencapai tujuan bersama," tegas Puan di Jakarta, Selasa (5/9).

Mantan Menko PMK ini juga berharap KTT ASEAN di Jakarta dapat menghasilkan langkah konkret untuk membantu perdamaian di Myanmar yang masih mengalami konflik dan krisis kemanusiaan. Puan mengingatkan komitmen negara-negara Asia Tenggara untuk mengatasi permasalahan di Myanmar yang tertuang dalam lima poin kesepakatan ASEAN.

"Kami di AIPA sangat fokus untuk membantu terciptanya perdamaian kembali di Myanmar. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah dengan pembentukan Komite Ad Hoc dalam rangka membantu Myanmar mencapai solusi damai dan berkelanjutan," urainya.

AIPA juga berhasil menghasilkan konsensus untuk mengeksplorasi pilihan mekanisme yang sesuai dan dapat digunakan dalam mengawasi implementasi Lima Poin Kesepakatan ASEAN. Parlemen negara ASEAN pun juga berencana mengirimkan *task force* (satuan tugas) ke Myanmar guna memantau penyelesaian krisis kemanusiaan dan melihat kondisi masyarakat di sana yang terdampak konflik.

hal/rdn



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Fadlun Bariyah, Prima Danutirta, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrull, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysle, Balleqys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Devi Iriandi, Runi Sari Budlarti, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldidi Opie, Hasni Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoyowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eny Sulistiowati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Ria Damayanti

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Scan QR untuk berita selengkapnya



DPR Harap Kroasia Jadi Pintu Masuk Ekspor CPO Indonesia ke Eropa

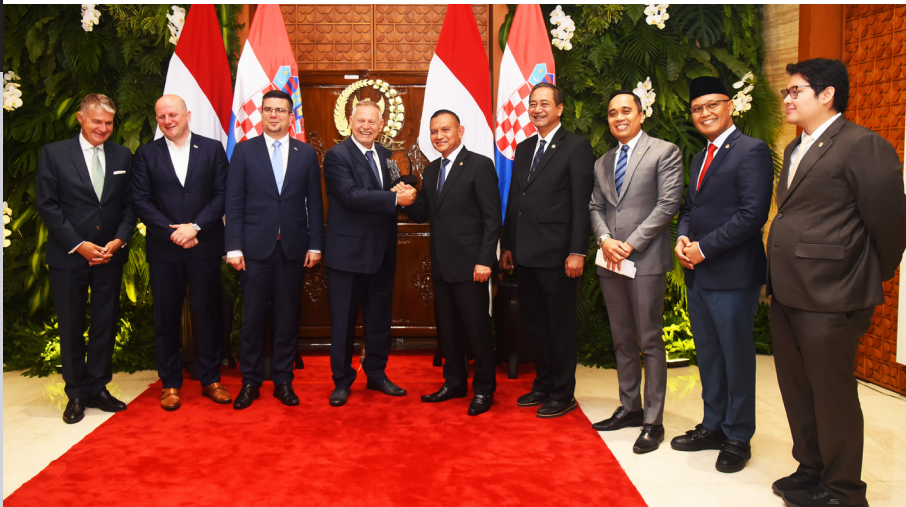


FOTO: RSB/PDT

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus dalam foto bersama usai menerima kunjungan kehormatan delegasi Parlemen Kroasia (Sabor) di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2023).

Bagi Indonesia, Republik Kroasia merupakan mitra kerja sama yang strategis di kawasan Balkan. Indonesia dan Kroasia telah memulai hubungan diplomatik di tahun 1992, dan September mendatang akan menandai 31 tahun hubungan baik antara kedua negara salah satunya melalui kerjasama antar Parlemen kedua negara. Dengan meningkatnya kunjungan dan dialog yang dijalankan antar kedua Parlemen menandakan turut meningkatnya kesepahaman terkait isu-isu strategis seperti politik, pertahanan dan ekonomi.

"Tentunya ini (kunjungan Parlemen Kroasia) sangat bagus ya, apa yang kita harapkan. Mereka

memang negara relatif kecil di Eropa tetapi mereka mempunyai pelabuhan laut yang bagus dan ada 3 pelabuhan modern disana. Nah apa artinya buat Indonesia? Kita tahu kan kita masih bermasalah dengan CPO kita untuk masuk ke Uni Eropa. Diharapkan dengan pintu masuk pelabuhan-pelabuhan modern di Kroasia jadi pintu masuk bagi CPO," ujar Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus usai menerima kunjungan kehormatan delegasi Parlemen Kroasia (Sabor) di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/8).

"Karena sebenarnya tidak ada alasan bagi Uni Eropa melarang kita, karena kita sudah mendapatkan pengakuan dari Uni Eropa sebagai bagian dari *clean energy*. Nah

peluang itu sangat besar. Tentunya bicara hubungan bilateral tentunya harus menguntungkan. Tentunya kita lihat apa sih yang bisa masuk kesana dan apa yang dikatakan Eropa dari Kroasia bisa masuk ke Indonesia," sambung Lodewijk menjelaskan.

Selain itu, di bidang pertahanan, Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan dalam pertemuan tersebut juga terdapat pembahasan kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan, khususnya minat Kroasia dalam menjajaki potensi kerja sama yang lebih intensif dengan Indonesia. Secara khusus, dalam menghadapi ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina dalam mencegah potensi konflik limpahan terhadap Kroasia dan dampak yang juga dialami oleh Indonesia.

Pimpinan DPR RI Bidang Korpolkam ini menegaskan permasalahan geopolitik wajib dituntaskan, mengingat permasalahan geopolitik berdampak kepada semua sektor, salah satunya masalah ekonomi. "Kita sudah rasakan ya, kemudian harga-harga naik, biaya hidup juga naik semuanya berdampak luar biasa. Dan kita semuanya sudah rasakan. Kita belum tahu bagaimana kalau nanti di Eropa musim dingin seperti apa dampaknya? Itu juga kita harapkan dengan kita hadir pendekatan melalui Parlemen mudah-mudahan konflik antara Rusia dan Ukraina dapat segera kita redam, kita selesaikan," pungkas Lodewijk.

pun/aha



Dasco: Dunia Menaruh Harapan Besar pada ASEAN



FOTO: YOG/PDT

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima kunjungan Delegasi Pemimpin Mahasiswa Malaysia, di ruang Abdul Muis Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2023).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima kunjungan Delegasi Pemimpin Mahasiswa Malaysia, di ruang Abdul Muis Gedung Nusantara. Dia mengungkapkan kebanggaannya bisa menerima kunjungan dari calon-calon pemimpin Negeri Jiran di masa yang akan datang. Dia pun berpesan agar mengoptimalkan forum diskusi atau dialog pada hari ini semaksimal mungkin.

"Jika waktunya masih ada dan memungkinkan, setelah dialog selesai, saya minta kepada staf dari Kesekjenan DPR RI untuk memandu berkeliling kompleks

parlemen Indonesia. Mengunjungi ruang rapat paripurna, ruang rapat komisi, museum, perpustakaan dan fasilitas lainnya," papar Dasco di ruang Abdul Muis Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8).

Dasco pun mengungkapkan, adanya fenomena yang patut disyukuri dari ASEAN di tengah adanya ancaman krisis pangan dan energi. Bahwa, di saat banyak negara yang tidak mampu dan tidak siap menghadapi ancaman krisis tersebut. Negara-negara ASEAN tidak hanya relatif lebih siap menghadapi ancaman krisis. Tetapi lebih dari pada itu, dunia menaruh harapan besar pada ASEAN, khususnya Indonesia-Malaysia.

Untuk mengambil peran strategis dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dunia dengan menjadi lumbung pangan global dan pusat pengembangan energi alternatif serta ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu, Dasco melihat adanya harapan, optimisme, dan masa depan yang cerah bagi negara-negara di ASEAN.

"Kemudian, sebagai penerus estafet kepemimpinan di Negeri Jiran, pesan saya kepada adinda sekalian sederhana saja, teruslah belajar, belajar dan belajar. Kapanpun dan dimanapun. Akhir kata, semoga kegiatan kunjungan pada hari ini memberikan kesan positif, menambah wawasan dan memperkuat tali persaudaraan kita," ungkap Dasco. **ssb/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Gus Imin Minta Presiden Jokowi Percepat Pembangunan Bandara Buleleng Bali



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat menerima aspirasi masyarakat Buleleng di Gedung Imaco Pelabuhan Buleleng, Bali, Selasa (22/8/2023).

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta

Pemerintah, khususnya Presiden Jokowi untuk mempercepat pembangunan Bandara Buleleng, Bali. Meski seharusnya, kata pria yang kerap disapa Gus Imin itu, aspirasi ini sepatutnya sejak dulu disampaikan padanya agar segera diteruskan ke Presiden Jokowi.

"Saya minta kepada Beliau (Presiden Jokowi) untuk benar-benar memperhatikan dan memberi percepatan dan kemudahan terwujudnya bandara di Buleleng. Kenapa baru sekarang

”

SAYA MINTA KEPADA BELIAU (PRESIDEN JOKOWI) UNTUK BENAR-BENAR MEMPERHATIKAN DAN MEMBERI PERCEPATAN DAN KEMUDAHAN TERWUJUDNYA BANDARA DI BULELENG. INI JUGA MENJADI PERHATIAN. SAYA SELAMA INI TIDAK BANYAK MINTA DENGAN PRESIDEN (JOKOWI)

disampaikan ke saya, kenapa tidak dulu-dulu. Ini juga menjadi perhatian. Saya akan menemui Bapak Presiden membawa aspirasi penting ini segera untuk bisa diwujudkan. Saya selama ini tidak banyak minta dengan Presiden (Jokowi)," ujar Gus Imin Cak Imin saat menerima aspirasi masyarakat Buleleng di Gedung Imaco Pelabuhan Buleleng, Bali, Selasa (22/8).

Diketahui, Penghulu Desa Adat Buleleng, Jro Sridana, meminta kepada Gus Imin, bahwa Buleleng dan sejumlah Kabupaten yang berada di pesisir utara Bali selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Imbasnya, kata Sridana, kemajuan dan kesejahteraan warga Buleleng berbanding terbalik dengan kondisi warga di wilayah pesisir selatan Bali. Bahkan, lebih tepatnya di kawasan Denpasar dan sekitarnya.

Lebih lanjut, Penglingsir Puri Agung Singaraja, AA Ngurah Ugrasena, menaruh harapan besar kepada Gus Imin serta seluruh pejuang PKB untuk memperjuangkan kebangkitan Buleleng menjadi Kota yang maju sebagaimana dahulu.

"Saya di sini menyampaikan, bukan berkeluh kesah, tetapi ini fakta bahwa Buleleng ini adalah Kabupaten termiskin di Bali. Beda sama Bali Selatan yang bergelimang Dolar. Kami ini anak kandung, bukan anak tiri. Maka kami ingin Buleleng ini harus bangkit, harus kembali menjadi kota yang besar, dan rakyat yang maju," tegas Ugrasena. [tn/rdn](#)

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Peta Standar China 2023 Terbit, Indonesia Terus Upayakan 'Soft Diplomacy'

Beberapa waktu lalu China, secara sepihak, merilis peta baru yang disebut sebagai 'Peta Standar China 2023'. Dampaknya, kehadiran peta tersebut memicu suasana panas di antara negara kawasan. Sebab negeri tirai bambu tersebut menggambarkan memiliki wilayah yang lebih luas dari peta yang jamak diketahui.

Kementerian Sumber Daya Alam China merilis peta itu bersamaan dengan Kesadaran Pemetaan Nasional China dan Hari Publisitas Survei dan Pemetaan. Peta tersebut mencakup wilayah yang disengketakan dengan negara-negara tetangga mulai dari Arunachal Pradesh dan Aksai Chin di India, Taiwan, hingga Laut China Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno mengungkapkan bahwa Indonesia akan terus mengupayakan *soft diplomacy*

melalui forum-forum multilateral ataupun bilateral. Salah satunya dengan Negara ASEAN dan Asia Selatan. Terlebih, Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dalam waktu dekat ini.

"Meningkatkan kita kan sebentar lagi akan melaksanakan KTT ASEAN untuk itu kita bisa trace isu-isu tersebut pada saat pembukaan (KTT ASEAN). Jadi Presiden (Jokowi) bisa menyampaikan dan juga (khususnya) undangan dari negara-negara lain," ungkapnya ketika ditemui tim Parlemenaria di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8).

Menurutnya, hal ini perlu untuk dikawal agar jangan sampai perbedaan persepsi memicu konflik yang berkepanjangan, bahkan perang terbuka. "Ini yang harus menjadi perhatian, dan juga *Spratly Island* yang terus dikembangkan mereka. China terus membangun kekuatan

militer di sana dan juga Australia yang meningkatkan patrolinya di seputaran sana. Terus juga US menambah lagi untuk memperkuat dari *presence* (kehadiran) mereka di Filipina," jelasnya

Ia menilai semua negara saling berkaitan karena untuk saling memantau perkembangan dari peta baru tersebut. Sehingga, apabila situasi keamanan meningkat, hal itu berpotensi menjadi akhir dari perang dingin berlanjut ke perang terbuka. "Ya, hal itu bisa merusak ataupun menghambat pembangunan ekonomi dan juga ketentraman dan kestabilan secara regional," tutup Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

— hal/rdn

”

**MENINGGAT KITA
KAN SEBENTAR
LAGI AKAN
MELAKSANAKAN
KTT ASEAN UNTUK
ITU KITA BISA
TRACE ISU-ISU
TERSEBUT PADA
SAAT PEMBUKAAN
(KTT ASEAN).**

Anggota Komisi I DPR RI
Dave Akbarshah Fikarno.



FOTO: RSB/PDT

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Mukhlis Harap ada Peningkatan Gaji untuk Pegawai Kemenlu Penempatan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Mukhlis Basri menilai, untuk harga dasar tunjangan luar negeri (ATDLN), homestay masih menjadi masalah yang dirasakan oleh pegawai yang ditempatkan di luar negeri. Sehingga ia berharap adanya

”
JADI INI YANG BEBERAPA KALI SAYA LANGSUNG DI YA MEREKA TIDAK MAU SEBUTKAN NAMA. TOLONG PAK NAMA SAYA JANGAN DISEBUT-SEBUT YA KARENA KALAU MAAF ARTINYA KALAU UNTUK TINGKAT ESELON SATU ESELON DUA ITU SEJAHTERA PAK KALAU UNTUK PEJABAT-PEJABAT INI.

peningkatan gaji dan *take home pay* untuk pegawai setempat atau lokal staf yang bekerja di luar negeri.

”Jadi ini yang beberapa kali saya langsung di ya mereka tidak mau sebutkan nama. Tolong Pak

nama saya jangan disebut-sebut ya karena kalau maaf artinya kalau untuk tingkat Eselon satu Eselon dua itu sejahtera Pak kalau untuk pejabat-pejabat ini. Tapi kalau kami ini saat ini dengan kondisi yang ekonomi saat ini, kami tolong betul pak, tolong disampaikan,” terang Mukhlis dalam Rapat Kerja Komisi I Bersama Kementerian Luar Negeri dengan agenda pembahasan RKA di Senayan, Jakarta, Kamis (31/8).

Dijelaskan sebelumnya bahwa Menlu mengajukan anggaran pada tahun 2024 ini sebesar 16 triliun lebih dan disetujui Rp8,2 triliun. Ibu beserta jajaran kembali berjuang dan disetujui dengan tambahan menjadi Rp8,5 triliun. sehingga Mukhlis mengaku prihatin akan kondisi tersebut.

Mukhlis melanjutkan, keberhasilan Menlu sebagai jajaran tidak lepas daripada dukungan daripada staf juga. Maka dari itu, dirinya menyampaikan amanah tersebut kepada Menlu.

”Saya kira itu saja bu yang dapat saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini sekali lagi ini saya menyampaikan titipan amanah, dan ini juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Sumber Daya Manusia yang ada di Kementerian Luar Negeri,” tutupnya. **hal,far/aha**



Anggota Komisi I DPR RI Mukhlis Basri saat mengikuti Rapat Kerja Komisi I Bersama Kementerian Luar Negeri dengan agenda pembahasan RKA di Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

FOTO: FHN/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Supriyanto Pertanyakan Kebijakan KPU Soal 'Paperless' pada Pendaftaran Bacaleg

Anggota Komisi II DPR RI Supriyanto memberikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan tahapan pendaftaran Bakal Calon Legislatif (bacaleg) untuk Pemilu 2024. Ia menilai implementasi pendaftaran Bacaleg secara daring melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) belum efisien dan efektif. Satu di antaranya terkait upaya paperless atau bersifat daring pada proses pendaftaran Bacaleg.

"Walaupun paperless, sampai saat ini, KPU (Komisi Pemilihan Umum) lebih percaya dengan fotokopi daripada bahan asli. Itu mesti diperhitungkan. Apalagi proses administrasi begitu langsung

”

WALAU PUN PAPERLESS, SAMPAI SAAT INI, KPU (KOMISI PEMILIHAN UMUM) LEBIH PERCAYA DENGAN FOTOKOPI DARIPADA BAHAN ASLI. ITU MESTI DIPERHITUNGKAN. APALAGI PROSES ADMINISTRASI BEGITU LANGSUNG DILAKUKAN OLEH KPU. MENURUT SAYA, MAUNYA BAIK TETAPI TIDAK MASUK AKAL.

dilakukan oleh KPU. Menurut saya, maunya baik tetapi tidak masuk akal," ucap Supriyanto dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR guna memantau perkembangan terkini persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (24/8).

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengingatkan agar KPU konsisten dalam mengupayakan kebijakan paperless tersebut. Palsanya, jika tidak yakin, ia menilai hal tersebut akan berimplikasi pada sulitnya para bacaleg yang mendaftar pada aplikasi Silon. "Online itu bagus, tapi ketika tidak bisa online (karena adanya kendala), harusnya KPU itu bisa memberikan alternatif. Saya ingin KPU memperhatikan hal-hal seperti ini," tandasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya, KPU telah menetapkan bahwa pendaftaran bakal caleg dilakukan secara daring atau *online* sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

Menggantikan kertas, KPU memanfaatkan teknologi informasi untuk melaksanakan digitalisasi Pemilu 2024 melalui aplikasi Silon. Anggota KPU RI Idham Holik menjelaskan aplikasi Silon akan membuat pekerjaan pada setiap tahapan pemilu menjadi efektif, efisien, tapi juga akurat. Walaupun begitu, pada implementasinya, Komisi II DPR menilai dalam penerapannya tidak sesuai harapan. ts.ail/rdn



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi II DPR RI Supriyanto saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR guna memantau perkembangan terkini persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (24/8/2023).

FOTO: TS/PDI

Terima Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia, Komisi III akan Suarakan ke Pihak Terkait



FOTO: FHN/PDI

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sahroni menerima audiensi (PPAI) yang mengadukan permasalahan terkait hak asuh serta kekosongan hukum atas anak korban perceraian di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sahroni menerima audiensi Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI) yang mengadukan permasalahan terkait hak asuh serta kekosongan hukum atas anak korban perceraian di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/9).

Dalam audiensi tersebut, PPAI mengadukan adanya diskriminasi terhadap anak usai proses perceraian. Pihak yang tergabung dalam PPAI menyampaikan adanya pemisahan anak secara paksa oleh salah satu orang tua kandung yang berseteru atau *parental abduction*.

Menanggapi, Politisi Fraksi Partai NasDem itu akan menyuarakan permasalahan ini kepada pihak terkait

agar segera ditindaklanjuti. "Mudah-mudahan dengan pengaduan ini kita bisa teruskan kepada pihak terkait, dan saya akan speak up sampai kepada Pak Presiden, untuk diberikan perhatian khusus tentang apa yang menjadi pengaduan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia," kata Sahroni usai menerima audiensi PPAI.

Sahroni mengaku turut berempati terhadap perasaan orang tua yang memperjuangkan anaknya tersebut. "Mudah-mudahan pak presiden bisa memerintahkan langsung apa yang menjadi hak seorang ibu bisa diberikan atensi lebih jauh kepada mahkamah agung, kepolisian, kejaksaan dan kepada kementerian hukum dan HAM," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Sahroni, aduan tersebut juga akan disampaikan

secara terbuka dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri pada sore hari ini, (4/9). Ia berharap, pemerintah segera memberikan atensi terhadap persoalan hak asuh anak korban perceraian di seluruh Indonesia.

"Mungkin persoalan ini belum terekspos lebih besar, maka perhatian pemerintah, perhatian presiden belum kedengeran, saya coba untuk mem-*blow up* tentang apa yang terjadi, bagaimana aturan pengadilan yang sudah inkrah tetapi tidak dijalankan," imbuh Sahroni.

Sebelumnya dalam audiensi, Perwakilan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia Angelia Susanto menyampaikan harapannya untuk dibentuk payung hukum bagi anak yang menjadi korban perceraian. Salah satu atensi Angelia yaitu, adanya sanksi pidana bagi orang tua yang melakukan pemisahan anak dengan orang tua secara paksa.

Secara rinci, Angelia berpendapat kasus penculikan anak oleh orang tua merupakan salah bentuk kriminalitas karena melanggar hak asasi anak maupun orang tua yang memperoleh hak asuh yang diputuskan oleh pengadilan. Ia menilai fenomena kasus pemisahan paksa anak korban perceraian ibarat gunung es, karena tak jarang masyarakat yang ingin bersuara.

"Kami memohon agar Komisi III bisa memasukkan agenda penculikan anak oleh orang tua kandung di dalam Undang-Undang. Titipan kami mungkin di RUU KIA yang sudah ada di prolegnas dan kami harap tahun ini bisa diproses," ujarnya. **ann/aha**



Jaga Produktivitas Pangan, Kementan Harus Siapkan Solusi Hadapi El Nino

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menyiapkan solusi menghadapi El Nino berkepanjangan. Hal tersebut, menurut Anggia, agar petani tidak menurun produktivitasnya akibat cuaca panas yang berkepanjangan.

"Karena ini kita sudah memasuki El Nino harus ada antisipasi yang memang update kepada masyarakat, warga terutama petani,

supaya tidak terlalu jatuh produktivitasnya karena nggak ada hujan. Karena perkiraan sampai Oktober nanti akan kekeringan dan ini masyarakat di lapangan sudah banyak kekeringan," ujar Anggia kepada **Parlementaria**, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Kementan, lanjutnya, bisa membantu mempersiapkan pompa air untuk mengairi ladang petani di tengah kekeringan yang terjadi. Sebab, El Nino yang berkepanjangan

”

KARENA INI KITA SUDAH MEMASUKI EL NINO HARUS ADA ANTISIPASI YANG MEMANG UPDATE KEPADA MASYARAKAT, WARGA TERUTAMA PETANI, SUPAYA TIDAK TERLALU JATUH PRODUKTIVITASNYA KARENA NGGAK ADA HUJAN.

ini diharapkan jangan sampai mempengaruhi persediaan pangan di dalam negeri.

"Harus ada, misalnya, terobosan penyediaan sumber-sumber air, harus ada itu. Kementerian Pertanian kalau misalnya dibutuhkan salah satunya di pompa air, meskipun tidak bisa ambil ke sumur, tetapi bisa mengalirkan. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan atau afirmatif yang bisa digunakan untuk para petani," jelas Politisi Fraksi PKB ini.

Diketahui, Indonesia saat ini sedang mengalami dampak dari El Nino. Fenomena El Nino menyebabkan berbagai wilayah di Indonesia mengalami musim kemarau lebih kering dibandingkan 3 tahun sebelumnya.

bia/rdn



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini.

PHOTO: AFR/PTD

Scan QR untuk berita selengkapnya



Tamanuri Soroti Masalah LRT Pasca Resmi Beroperasi: Jangan Berlarut-Larut, Harus Cepat Diatasi

Moda transportasi publik *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek telah resmi beroperasi penuh pada beberapa hari lalu, tetapi masih banyak masalah yang dikeluhkan oleh penumpang dalam penggunaannya. Anggota Komisi V DPR RI Tamanuri berharap masalah yang masih terjadi pada LRT itu tidak terjadi berlarut-larut. Ia pun meminta permasalahan-permasalahan yang ada segera dibenahi.

"Ya untuk sementara ini bisa kita maklumi, akan tetapi ini jangan berlarut-larut dong. Harus cepat diadakan perubahan-perubahan sehingga masyarakat itu bisa menikmati LRT ini," ujar Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut kepada **Parlementaria**, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8).

Sebab, lanjutnya, LRT sendiri dibangun dengan menggunakan anggaran yang tidak sedikit, sehingga masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat dari adanya moda transportasi LRT ini. "Karena dana yang kita gunakan bukan sedikit, jadi masyarakat mau merasakan itu. Karena antara lain dana itu tentunya akan dipulangkan nanti dari pajak-pajak yang diambil kepada masyarakat, nah ini

mereka mau menikmati dong," tegasnya.

Untuk itu, pihaknya berharap permasalahan yang masih terjadi dapat menjadi evaluasi KAI dan terus dibenahi sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya. "Jangan berlarut-larut bahwa ini diulangi-diulangi dan diselesaikan dengan permohonan maaf. Enggak boleh seperti itu, karena masyarakat mau secara *real* dia akan merasakan. Dari Bekasi 42 menit betul-betul 42 menit, jangan dia sampai menunggu satu jam, terbengkalai segala macam. Ini ada kaitannya dengan pekerjaan dan segala macam kan," tutupnya.

Diketahui, sejak resmi beroperasi pada 28 Agustus 2023 lalu, masih terdapat beberapa keluhan dari penumpang LRT Jabodebek.

Keluhan tersebut di antaranya adalah adanya gangguan perjalanan pada Rabu (30/8) yakni pintu kereta yang tidak bisa ditutup dan gangguan listrik yang padam pada pembangkit listrik LRT. Selain itu, sebelumnya jembatan lengkung longspan Kuningan juga dianggap mengalami kesalahan desain, dikarenakan kurang lebar, sehingga kereta harus melambat saat melewatinya. — **bia/rdn**

Anggota Komisi V DPR RI
Tamanuri.

FOTO: EOT/PDT



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Komisi V Dukung Penuh Kemenhub Pastikan KTT ASEAN Berjalan Lancar dan Aman

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal menyatakan Komisi V DPR RI mendukung penuh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beserta segenap jajaran stakeholder terkait untuk memastikan acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang digelar pada 5-7 September 2023 mendatang berjalan lancar dan aman. Terutama, dalam

persiapan VVIP di Bandar Udara (Bandara) Internasional Soekarno Hatta, jelang kedatangan 27 delegasi negara-negara ASEAN.

Penegasan tersebut disampaikan Muhammad Iqbal saat wawancara dengan **Parlementaria** usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sekjen, Irjen Kepala BPSDM dan Kepala BKT Kemenhub yang digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Kamis (31/8).

"Saya kira kita sangat bersyukur ya karena Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN ini dan kita harapkan semua dapat berlangsung lancar dan aman. Dan dalam hal ini kita minta kepada Kemenhub untuk berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait berkaitan yang berkaitan dengan pelaksanaan KTT tersebut dalam rangka melancarkan kegiatan tersebut," ujar Muhammad Iqbal.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) ini mengimbau Kemenhub untuk harus segera berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Polri) dalam hal pengamanan bandara maupun rencana rekayasa lalu lintas.

"Dan saya kira itu akan dilakukan untuk memberikan kelancaran tersebut. Dan kami di Komisi V DPR RI terus memantau bagaimana persiapan Kemenhub yang berkaitan acara tersebut. Tentu ini namanya perhelatan yang harus kita dukung bersama-sama," tandas Muhammad Iqbal.

Seperti diketahui Menhub Budi Karya Sumadi meninjau Terminal VVIP Bandara Internasional Soekarno Hatta, di Tangerang, Banten, Rabu (30/08/2023). Kehadiran Budi untuk mengecek dan memastikan kesiapan pelayanan bandara tersebut jelang penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN, di Jakarta, pada 5-7 September mendatang.

Dalam peninjauan, Menhub mengecek Terminal 3 VVIP dan *Commercial Important Person* (CIP) yang berada di Terminal 1. Budi juga melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait kesiapan rencana *flow* kendaraan, parking stand pesawat, *aircraft* and delegation, serta pengaturan jadwal kedatangan dan keberangkatan pesawat.

Kemenhub bersama Polri dan Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas hingga ganjil genap selama penyelenggaraan KTT Ke-43 ASEAN di Jakarta. Pengaturan arus kendaraan selama KTT ASEAN diyakini bisa membuat acara berlangsung dengan lancar.

pun/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sekjen, Irjen Kepala BPSDM dan Kepala BKT Kemenhub yang digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Kamis (31/8/2023).

FOTO: EOT/PTD

Khilmi Minta Menteri Erick **Beri Perhatian Lebih kepada BUMN Karya**

Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi meminta Menteri BUMN

Erick Tohir memberikan perhatian lebih kepada BUMN Karya yang masih memiliki permasalahan keuangan akibat penugasan pemerintah. Ia menilai, permasalahan pada BUMN Karya salah satunya juga disebabkan penugasan yang diberikan kepada pemerintah.

”

SAYA HARAP MENTERI BUMN INI JUGA BERI PERHATIAN BESAR KEPADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN KARYA INI YANG BANYAK BERJASA UNTUK MEMBUAT INFRASTRUKTUR DI INDONESIA INI SANGAT BAGUS.

”Saya harap Menteri BUMN ini juga beri perhatian besar kepada perusahaan-perusahaan karya ini yang banyak berjasa untuk membuat infrastruktur di Indonesia ini sangat bagus. Karena kalau bukan BUMN karya ini yang mengerjakan, mungkin proyek-proyek nasional ini banyak yang mangkrak di masa Covid ini,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Kementerian BUMN di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8).

Untuk itu, pihaknya mendorong Kementerian BUMN agar segera memproses pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN yang membutuhkan suntikan dana tersebut. Sehingga, pengerjaan penugasan-penugasan pemerintah yang diberikan kepada BUMN Karya dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaannya.

”Jadi harapan saya dari Kementerian BUMN ini untuk segera memberikan PMN kepada perusahaan-perusahaan karya ini. Kalau memang pembayaran yang diperlukan penugasan dari pemerintah ini belum bisa cepat cair, dia sendiri sekarang ini mau utang bank, bank manapun tidak mau memberi pinjaman sedangkan dia banyak pekerjaan pekerjaan yang harus segera diselesaikan.

 **arn,bia/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Kementerian BUMN di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Komisi VI Apresiasi Tol Bocimi, Mampu Tingkatkan Perekonomian Sukabumi

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Sukabumi yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal telah melakukan pertemuan dengan Kementerian BUMN, dan PT. Waskita Karya. Hekal mengungkapkan bahwa pembangunan tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi) akan beroperasi dengan baik serta membuka adanya peluang untuk mendorong wilayah Sukabumi serta kawasan Jawa Barat seluruhnya untuk peningkatan perekonomian.

"Hari ini kita juga sudah sampai ke pintu tol parung kuda, ternyata tolnya memang cukup bagus. Dan yang menjadi bahagia hari ini setelah pemaparan oleh mitra kerja terkait, bahwa target LHR(Lalu Lintas Harian Rata-rata) yang diharapkan sudah hampir mendekati pencapaian target LHR. Artinya tol ini akan beroperasi dengan baik dan memang mendorong wilayah Sukabumi serta kawasan Jawa Barat secara umumnya untuk peningkatan perekonomian," kata Hekal di Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (29/8).

Pada tahun 2023, pembangunan tol Bocimi berhasil mencapai seksi 2. Komisi VI berharap agar seksi 3 dapat selesai pada akhir tahun 2024, membuka jalan bagi beroperasinya tol ini pada awal 2025 dan merambah hingga ke Sukabumi Barat. "Yang kita harapkan, tentunya jalan tol Bocimi bisa diteruskan. Memang kita memberikan PMN(Penyertaan Modal Negara) kepada jalan tol Bocimi, itu usulan tahun 2019 kalau tidak salah.

Dan alhamdulillah pada tahun 2023 sudah bisa maju sampai ke seksi 2. Kita harapkan seksi 3-nya bisa selesai di akhir tahun 2024 sehingga bisa beroperasi di awal 2025 yang akan meneruskan seksi ini sampai ke Sukabumi Barat," ungkap Legislator Dapil Jawa Tengah IX ini.

Dalam konteks pelayanan masyarakat, adanya tol Bocimi dapat mengurangi waktu perjalanan yang dulu memakan waktu 5 jam menjadi hanya 2 setengah jam dari Jakarta ke Sukabumi. Peningkatan konektivitas ini diharapkan akan membuka peluang ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Jawa Barat. "Tapi Alhamdulillah sampai di titik ini

(pintu tol Parung Kuda) saja, nanti wilayah Pelabuhan Ratu akan bisa berkembang dengan pesat, kira-kira dari titik sini (pintu tol Parung Kuda) untuk menuju ke Pelabuhan Ratu tinggal 1 jam 20 menit," ucap Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Dengan pembangunan tol Bocimi seksi 3 yang mungkin akan mencari pendanaan komersial dan perpanjangan hingga seksi 4, serta rencana untuk menghubungkannya dengan tol Cipularang, Hekal merasa optimis bahwa pembangunan tol Bocimi akan membawa peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. **mun/aha**



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (29/8/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Tak Sekadar Kejar Target, Peningkatan Lifting PHR Harus Tetap Pertimbangkan Sisi Ekonomi



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon saat bertukar cenderamata usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Pertamina Hulu Rokan, Pekanbaru, Riau.

Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Pertamina Hulu Rokan, Pekanbaru, Riau. Dalam pertemuan, terdapat beberapa pembahasan, salah satunya terkait dengan upaya peningkatan lifting minyak oleh perusahaan tersebut.

Hingga kini, Pertamina Hulu Rokan (PHR) setiap harinya tercatat melakukan lifting minyak bumi sebanyak lebih dari 160 ribu barel. Angkainya meningkat sejak pertama kali dilakukan serah terima dari Chevron ke Pertamina, namun masih jauh di bawah capaian pada rentang 1980 - 1990-an. Pada tahun 2031 mendatang, PHR ditargetkan harus

mampu melakukan lifting minyak bumi hingga 231 ribu barel per hari. Hal ini ditujukan untuk mendukung target 1 juta barel per hari yang dicanangkan SKK Migas.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon, dalam kesempatan itu, meminta PHR untuk tetap berhati-hati dalam mengambil langkah-langkah yang akan mendukung pencapaian target tersebut. Ia menekankan agar PHR mempertimbangkan dari sisi ekonomi seperti membandingkan investasi yang dilakukan dengan hasil yang akan didapatkan.

"Dia (PHR) akan mencoba di tahun 2031 itu kurang lebih sekitar 231 ribu barel per day (bpd). Kita mau coba

buktikan, tapi kembali lagi harus *economic wise*. Tidak mungkin kalau kita investasinya terlalu besar tapi dengan hasil yang cuman 231 ribu barel. Itu harus betul-betul *economic wise*," ujarnya sesuai rapat, di Pekanbaru, Riau, Jumat (1/9).

Dony menjelaskan bahwa Blok Rokan yang kini dikelola PHR pernah mencapai produksi tertingginya pada awal era tahun 1980-an hingga mencapai 1,2 juta barel per hari. Produksi Blok Rokan terus menurun hingga berhenti produksi selama 3 tahun sebelum resmi dilakukan serah terima. Di awal operasionalnya di bawah PHR, Produksi Blok Rokan hanya berkisar 100 ribu barel per hari dan jumlahnya terus meningkat.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI-P ini menyampaikan bahwa dengan progres yang ditunjukkan oleh PHR maka target 231 ribu barel per hari pada 2031 kemungkinan besar dapat terealisasi. Terlebih, saat ini menurutnya PHR masih melakukan uji coba dalam berbagai hal termasuk dalam penggunaan teknologi.

Selain itu, hal lain yang menjadi sorotan anggota maupun pimpinan Komisi VII DPR RI adalah mengenai tanggung jawab sosial perusahaan serta keterlibatan masyarakat lokal dalam operasional PHR. Komisi VII DPR RI meminta agar Pertamina tak hanya memanfaatkan hasil bumi yang ada di Riau tapi juga bisa memberikan dampak baik masyarakat Riau. [uc/rdn](https://www.riau.go.id/uc/rdn)



Andi Yuliani Paris: PLTU Suralaya Punya Teknologi Canggih Untuk Saring Polutan

Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris mengatakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya sudah memiliki teknologi untuk menyaring polutan hasil pembakaran batu bara. "Kalau kita lihat teknologi yang sudah digunakan oleh PLTU Suralaya, di mana sudah mempunyai teknologi yang bisa menyaring partikel-partikel yang

berpotensi untuk menjadi polutan, itu sudah digunakan," ujar Andi Yuliani Paris usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke PLTU Suralaya, kota Cilegon, Provinsi Banten, Jumat (1/9).

Lebih lanjut, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mengatakan adanya penyebab buruknya kualitas udara di Jakarta dikarenakan tata ruang industri dan pemukiman yang tidak tertata dengan baik. "Tidak ada sanksi bagi penyelenggaraan negara yang tidak mampu menjalankan rencana tata ruang, sekitar Bekasi, contohnya daerah-daerah industri kecil-kecil, tetapi mereka juga menggunakan solar, menggunakan pembangkit yang kecil tetapi juga ada batubara," ucapnya.

Selain itu, Andi juga memaparkan bahwa aktivitas industri kecil tersebut dapat menghasilkan polutan sehingga menyebabkan polusi udara. "Dan ini juga punya kontribusi, walaupun

transportasi juga memberikan kontribusi. Nah, kita tahu bahwa transportasi di Kota Jakarta ini banyak kendaraan motor roda dua, yang mayoritas bisa dikatakan 100% menggunakan pertalite, yang RON-nya lebih rendah dibandingkan dengan Pertamina. Artinya, pertalite belum bisa dikategorikan energi bersih," ujarnya.

Politisi PAN juga menjelaskan adanya paparan dari Profesor Puji Lestari bahwa PLTU tidak menyumbang polusi udara. "Profesor Puji Lestari tadi, dari ITB, yang diminta oleh PLTU Suralaya ini untuk mengkonfirmasi, memperbandingkan ada bench pakai, per bulan, ternyata memang tidak terbukti bahwa PLTU Suralaya memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap polusi udara Jakarta," katanya.

Namun, Andi tetap mewanti-wanti agar di PLTU Suralaya tidak terjadi kebocoran. "Tetapi apakah cukup sampai disitu, tentunya kita juga meminta untuk PLTU Suralaya menjaga ini, jangan sampai suatu saat terjadi kebocoran, menjadi masalah yang nanti juga bisa memberikan kontribusi terhadap polusi udara yang ada di Kota Jakarta," katanya.

Dengan demikian, Legislator Dapil Sulawesi Selatan juga mengimbau kepada sejumlah kepala daerah di sekitar Jakarta yang mana memiliki industri, seperti Bekasi, Karawang, dan Cikarang. "Perlu duduk bersama antara ketiga Gubernur ini, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat untuk memetakan wilayah-wilayah industri dan juga tata ruangnya juga diperbaiki," tutupnya.

ass/aha



FOTO: AAS/PDT



Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke PLTU Suralaya, kota Cilegon, Provinsi Banten, Jumat (1/9/2023).

Legislator Minta DTKS Kemensos Perlu Dipastikan Kembali Guna Tepat Sasaran

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad meminta program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terhadap penerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) terus dilakukan. Dengan tujuan membantu masyarakat miskin dan rentan, Sehingga program dan bantuan yang dialokasikan untuk penerima manfaat, perlu dipastikan memenuhi kebutuhan dan

menjawab permasalahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Melalui Kemensos, Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) senilai total Rp30.252.595.534 di Sentra Abiseka Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (1/9). "Karena tujuannya untuk dapat meningkatkan ekonomi, jadi jangan sampai bantuan habis di modal saja, Kami dari Komisi VIII

DPR RI Terus dorong kebijakan yang pro masyarakat. Kami berikhtiar mewujudkan masyarakat yang sejahtera," ujar Achmad saat memimpin kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Sentra Abiseka Pekanbaru.

Dalam bantuan Atensi ini merupakan program dari Kementerian Sosial RI khususnya Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, untuk membantu kelompok rentan agar bisa berfungsi sosial secara normal dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Program tersebut menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak seperti, pembinaan kewirausahaan, terapi mental spiritual, bantuan sosial serta dukungan aksesibilitas.

"Jadi kita dari DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Sosial menyerahkan berbagai bantuan itu untuk meringankan masyarakat kita terutama masyarakat yang menyandang disabilitas, sehingga dengan bantuan ini mereka lebih bisa berdaya, lebih bisa mandiri dan akhirnya mereka juga percaya diri dalam meningkatkan usaha. Termasuk tadi mahasiswa kita bantu dalam rangka memperlancar kuliahnya. Jadi ini salah satu kunjungan kami dalam rangka penyerahan bantuan berbagai komponen masyarakat yang mengalami displotias seperti itu," tandas Politisi Fraksi Partai Demokrat. **upi/aha**



FOTO: UII/PDI

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad saat menyerahkan bantuan secara simbolis melalui Kemensos di Sentra Abiseka Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (1/9/2023).



Timbulkan Kekisruhan, Selly Evaluasi Pengelolaan Ibadah Haji Bertepatan dengan Umrah

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina melakukan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Salah satu evaluasi yang disoroti Selly adalah terkait pengelolaan ibadah haji yang bertepatan waktunya dengan ibadah umrah.

Sehingga, hal itu menimbulkan kekisruhan lantaran banyak maktab-maktab yang harusnya diisi oleh para jamaah haji tetapi digunakan oleh jamaah haji yang menggunakan visa ziarah umrah. Karena itu, tegasnya, hal ini akan menjadi catatan bagi Komisi VIII DPR RI sebagai evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 kali ini.

"Nah tentu ini menjadi catatan kami dari komisi VIII (yaitu) bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah, khususnya dari pihak imigrasi, dari pihak Kementerian Agama, pihak bandara bisa meloloskan para jamaah (umrah) dan tentu di luar itu juga pelayanan yang diberikan," ungkap Selly usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Jumat (1/9).

Ia melanjutkan bahwa apa yang disampaikan para mitra untuk menjelaskan kekisruhan tersebut, menurutnya, masih sebatas jawaban secara administratif. Hal itu, seperti

para mitra telah melaksanakan pemberangkatan haji sesuai dengan standar pelayanan operasional. Sehingga, dirinya ingin mengetahui lebih lanjut dalam tinjauan ini.

"Tadi kan sempat ada pernyataan dari pihak imigrasi bahwa ternyata di tahun 2023 hari ini kenapa banyak sekali visa-visa ziarah yang umroh diloloskan untuk berangkat pada saat sudah dilaksanakan pemberangkatan haji. Ternyata, kebijakan itu berbeda dengan kebijakan yang sudah dilakukan tahun 2022. Karena pada saat 2022 ada kesepakatan antara Kementerian Agama dengan pihak imigrasi (yaitu bahwa) pada saat sudah diberangkatkan haji tidak bisa tidak diizinkan (jamaah lain) untuk yang (berangkat) umrah atau misalnya bisa ziarah untuk diberangkatkan umrah," jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Tetapi, lanjutnya, di 2023, kebijakan ini malah bisa dibebaskan. Hal itu dengan alasan bahwa agar Pemerintah Arab Saudi saja yang akan melakukan pengawasan setiba di tanah suci. Jawaban tersebut, menurutnya, menjadi titik terang evaluasi yang akan diperbaiki tahun depan. Ia mengaku Komisi VIII DPR RI akan terus melakukan perbaikan dalam pengawasan haji. Ia pun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji mendatang akan ada perubahan, yang dimulai dari undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Sebab aturan yang ada saat ini menurutnya sangat ringan sanksinya. [hal,ail/rdn](https://www.halailrdn.com)



FOTO:HAL/PDI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Jumat (1/9/2023), ke kabupaten Badung, provinsi Bali, Jumat (25/8/2023).

Saniatul Lativa Usul Kemnaker Tambah Kuota Formasi Pengawas Ketenagakerjaan CPNS 2023

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diusulkan menambah kuota tim pengawas ketenagakerjaan dalam formasi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2023 ini. Meski dari Pemerintah Daerah (Pemda) selalu ada usulan penambahan kuota, namun faktanya Pemerintah Provinsi (Pemprov) masih mengalami kekurangan untuk tim pengawas ini.

"Tadi pada saat rapat kerja dengan Pemerintah Provinsi Riau yang dipimpin oleh Kepala Disnakertrans Riau dalam hal ini tentang ketenagakerjaan dan saya tadi mengusulkan pentingnya penambahan di kuota tim pengawas. Karena kita tahu bahwa jumlah tim pengawas di seluruh Indonesia masih sangat kurang sekali dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada," ujar Anggota Komisi IX DPR RI Saniatul Lativa di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, Pekanbaru, Jumat (1/9).

"Dan tadi disampaikan oleh Pemerintah Daerah bahwasanya jumlah perusahaan yang sudah melaksanakan wajib lapor itu berjumlah 34 ribu dengan jumlah pengawas hanya 35 orang, tentu ini sangat kurang sekali. Maka saya tadi mengusulkan supaya ditambah lagi anggarannya bagi Kementerian Tenaga Kerja untuk nantinya ketika ada lowongan untuk CPNS dibuka

seluas-luasnya khusus untuk tim pengawas," lanjut Saniatul.

Saniatul juga mengingatkan, jika CPNS sudah diangkat sebagai tim pengawas, maka dari Pemda juga harus ada kolaborasi agar jangan lagi tim pengawas dialih profesi. "Karena ini terjadi saat ini, dia sudah punya sertifikat sebagai tim pengawas timwas untuk perusahaan perusahaan seluruh Indonesia, akan tetapi oleh Pemda dijadikan di dinas apa sehingga beralih profesi. Nah ini supaya menjadi perhatian kita bersama," sorotnya.

Mengingat, ungkap Politisi Fraksi Partai Golkar ini, masih banyak ditemukan juga perusahaan-perusahaan yang belum menunaikan kewajibannya dalam hal menyampaikan hak pekerja yaitu melindungi jaminan sosial untuk ketenagakerjaan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

baik penerima upah maupun bukan penerima upah.

"Jadi pentingnya tim pengawas agar seluruh pekerja di seluruh Indonesia ini terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaannya sehingga kepesertaan untuk jaminan ketenagakerjaan itu bisa sesuai dengan harapan kita bersama. Bekerja keras bebas cemas," pungkas Saniatul. — pun/aha



FOTO: PUN/PDT

Anggota Komisi IX DPR RI Saniatul Lativa saat mengikuti tim kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Riau di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, Pekanbaru, Jumat (1/9/2023).

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Bahas Penanganan Polusi Udara, Charles Honoris Usul Bentuk Pansus

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan polusi udara. Ia mengatakan, jika tak ada keseriusan dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut, DPR akan membentuk panitia khusus (Pansus) terkait polusi udara.

"Kalau pemerintah enggak serius, kita ini, teman-teman di sini sudah banyak yang

mengusulkan mau pansus. Karena apa? karena ini menyangkut nyawa, menyangkut kita semua, menyangkut anak cucu kita," ujar Charles dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8).

Charles menyampaikan, wacana pembentukan pansus perlu disampaikan karena polusi udara menyangkut keselamatan bersama. Namun, ia melihat belum adanya keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan polusi udara. Sebab, setiap kementerian/lembaga menjalankan kebijakannya sendiri-sendiri tanpa adanya sinergi satu sama lain.

"Saya senang sekali tadi yang dipaparkan Pak Menteri, ada strateginya, ada data yang dampaknya seperti apa, tapi secara keseluruhan pemerintah belum bekerja secara bersama-sama mencari solusi dan melakukan apa. Ini belum kelihatan," ujar dia.

Charles juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mengatasi sejumlah persoalan. Sebab masalah polusi udara baru menjadi perhatian pemerintah ketika hal tersebut viral di media sosial. "Sejujurnya saya sedih melihat bagaimana permasalahan diselesaikan di Republik ini. Seringkali pola penyelesaian masalah itu, pola pemadam kebakaran dan berdasarkan viral atau tidaknya suatu masalah," kata Charles.

"Ketika sedang viral, seolah-olah penegakan hukum langsung dilakukan. Saya baca kemarin KLHK tiba-tiba melakukan penegakan hukum terhadap 11 industri begitu, tapi itu kan kembali lagi, *kok* ini seperti itu tadi, karena viral dan dicoba seakan-akan pemerintah tegas," imbuhnya.

Dalam rapat tersebut, Komisi IX juga menyepakati 4 poin terkait penanganan polusi udara, yaitu Komisi IX mendesak Kemenkes bersama kementerian/lembaga lain meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penanganan dampak polusi udara terhadap kesehatan, khususnya untuk mendorong pengendalian polusi udara di sisi hulu dan menyusun kebijakan pengendalian polusi udara secara terpadu. ann/aha

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris.



Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: MGN/PDT

Komisi X Ingatkan Urgensi Evaluasi Sistem Zonasi pada Penyelenggaraan PPDB 2023-2024

Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti mengingatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) agar mengevaluasi penyelenggaraan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023-2024. Ia menegaskan

evaluasi ini bersifat urgen agar isu sekaligus kekecewaan yang sama tidak terulang kembali di tahun ajaran mendatang.

"Pada tahapan (mendatang sistem zonasi pada PPDB) untuk disiapkan (agar tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Sistem zonasi bagus (itu) apabila pemerintah ini sudah memenuhi kewajiban untuk menyediakan seluruh sarana prasarana secara merata. (Namun) problem-nya adalah pemerintah belum memiliki kemampuan itu," tutur Agustina Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8).

Ia menekankan bahwa memperoleh pendidikan yang layak adalah hak dari generasi muda bangsa. Kesuksesan penyelenggaraan pendidikan, sebutnya, harus tercermin dari kebijakan yang afirmatif dari sisi Pemerintah

Indonesia. Di mana, kebijakan tersebut mendukung kesejahteraan dan kompetensi guru, menyiapkan dukungan infrastruktur, dan sistem belajar yang inklusif.

Selain itu, politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mendorong keadilan dan pemerataan pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, dirinya berharap evaluasi PPDB yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek bisa melahirkan solusi nyata. "Kita berupaya mendorong supaya pemerataan dan keadilan itu mendekati nilai yang lebih pantas bagi hak siswa. Kalau pemerintah sudah memenuhi kewajiban syarat objektifnya adalah bahwa semua sekolah dan pendukung itu ada, sehingga bisa dilakukan zonasi," tandas Agustina.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo mengaku sedang menimbang untuk menghapus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek akan mengevaluasi lebih komprehensif terkait sistem zonasi pada PPDB.

Berkenaan dengan hal tersebut, Plt Kepala BKHM Kemendikbudristek Anang Ristanto menyampaikan akan terbuka dan menerima semua masukan serta saran terkait kebijakan yang telah dikeluarkan, termasuk pelaksanaan PPDB ini. Setiap masukan dan saran, ungkapnya, akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan, untuk pelaksanaan PPDB di seluruh Indonesia mendatang.

ts.ail/rdn



FOTO:DEP/PTD

Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti saat Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Skripsi Tak Wajib, Putra Nababan: Bentuk Kemerdekaan Belajar

Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan mengapresiasi langkah Mendikbudristek yang tidak lagi menjadikan skripsi sebagai syarat wajib kelulusan bagi mahasiswa. Menurutnya, langkah tersebut adalah bentuk kemerdekaan belajar. Sebab,

kampus-kampus bisa menentukan sendiri cara mereka meluluskan mahasiswanya.

"Ya justru menurut saya ini adalah sesuatu kebijakan yang memberikan kemerdekaan kepada kampus ya. Kepada anak-anak mahasiswa bahwa skripsi bukan satu-satunya syarat untuk mereka bisa lulus dan menyelesaikan pendidikan tinggi," kata Putra kepada **Parlementaria** di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menambahkan, kebijakan tersebut menarik karena dinilai lebih cocok bagi dunia industri dan dunia usaha. Kelulusan tanpa skripsi, tambahnya, menjadi suatu langkah baik bagi dunia usaha. Sebab, di berbagai bidang, kelulusan berbasis proyek (*project based*) lebih dibutuhkan dibanding skripsi.

"Kalau mereka mau buka lapangan pekerjaan, mereka menjadi pengusaha, mereka mempunyai start up dan segala macam, tentunya *project based* itu paling penting daripada skripsi. Dan kalau mereka kerja di dunia profesional kayak saya 25 tahun di dunia profesional, saya hampir nggak pernah baca skripsi mahasiswa. Jadi buat saya ini sangat menguntungkan dunia profesional, sangat menguntungkan dunia usaha, sangat menguntungkan dunia industri," tutupnya.

Diketahui sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengumumkan beberapa aturan baru untuk perguruan tinggi yang tertuang dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Salah satu aturannya adalah mengatur bahwa mahasiswa D4/S1 tidak wajib membuat skripsi dan mahasiswa S2 tidak wajib menerbitkan jurnal.

bia/rdn

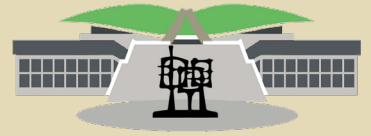


Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan.

FOTO: DEP/PTI

Scan QR untuk berita selengkapnya





DEPUTI PERSIDANGAN SETJEN DPR RI SUPRIHARTINI SAAT BERFOTO BERSAMA DENGAN ENAM PEJABAT SETJEN DPR RI NOMINATOR CALON PENERIMA SATYA LENCANA WIRAKARYA DI GEDUNG DPR RI, SENAYAN, JAKARTA, KAMIS (7/9/2023). FOTO: PRIMA



WAKIL KETUA BURT DPR RI DEDE INDRA PERMANA MEMIMPIN PERTEMUAN DENGAN JAJARAN RUMAH SAKIT COLUMBIA ASIA, SEMARANG, SELASA (5/9/2023). FOTO: MRI/AHA



BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI SAAT MENERIMA PENGHARGAAN PELAKSANAAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM 2023 DARI PERPUSNAS RI UNTUK BULETIN 'PARLEMENTARIA', RABU (6/9/2023). FOTO: JKA/AHA

